

**TAHUN  
2019**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY**

Jalan Argulobang Nomor 19 Yogyakarta  
Telp. (0274) 588518 , Faks. (0274) 512447  
Website: <http://dlhk.jogjaprovo.go.id>

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. LKjiP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 12 Februari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan DIY



# Ikhtisar Eksekutif

---

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas”:
  - Diukur dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (Capaian IKLH tahun N yang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%).
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengelolaan Persampahan Regional, dan Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan .
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 91,47%; sampai dengan bulan Desember 2019 terealisasi 92,29%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,90 %.
  - Jika dibandingkan dengan capaian target tahun 2018 sebesar 93,26%, capaian tahun 2019 menurun 1,03 %.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya produksi kehutanan”:
  - Diukur dengan indikator nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan, Program Pengelolaan Hutan Konservasi, serta Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2019 adalah sebesar 742.060 juta rupiah. Sehubungan dengan proses perhitungan yang belum final dari BPS DIY, maka realisasi masih menggunakan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar

1.020.262,40 juta rupiah. Capaian ini terhitung telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 137,49 %.

- Karena nilai tersebut menggunakan capaian tahun lalu, maka hasil capaian 2019 tidak dapat dibandingkan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan
2. Pencemaran air
3. Pengelolaan sampah
4. Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan tanpa izin
5. Pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan ekonomi
6. Resolusi permasalahan tenurial
7. Penyediaan bibit kehutanan yang berkualitas

# Daftar Isi

---

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN .....	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah .....	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.....	10
1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	11
1.4 Isu-isu Strategis .....	14
1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	16
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018 .....	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	25
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	25
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	26
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2019 .....	27
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	30
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	32
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019.....	41
3.3. Realisasi Anggaran .....	43
3.4. Inovasi .....	44
BAB IV PENUTUP .....	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	47

# Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	17
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	21
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019 .....	22
Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018.....	23
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2017-2022 ...	26
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	26
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019 .....	28
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019 .....	29
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2019 .....	30
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	32
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019 .....	33
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1 .....	33
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja .....	34
Tabel III.5 Nilai IKLH dan Penghitungan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	35
Tabel III.6 Capaian IKLH DIY Tahun 2017, 2018 dan 2019 dibandingkan dengan IKLH Nasional Tahun 2018 .....	35
Tabel III.7 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY .....	36
Tabel III.8 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara di DIY .....	37
Tabel III.9 Hasil Perhitungan IKTL DIY .....	38
Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	38
Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 .....	39
Tabel III.12 Komponen Penyumbang PDRB Sub Sektor Kehutanan Tahun 2018 dan 2019.....	39
Tabel III.13 Potensi Penyerapan dan Perdagangan Karbon dari Kawasan Hutan Tahun 2019.....	41
Tabel III.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019 .....	43

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY .....	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY .....	11
Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK,Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP .....	31

# BAB I

## Pendahuluan

### **Bab I berisi :**

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun sebelumnya*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

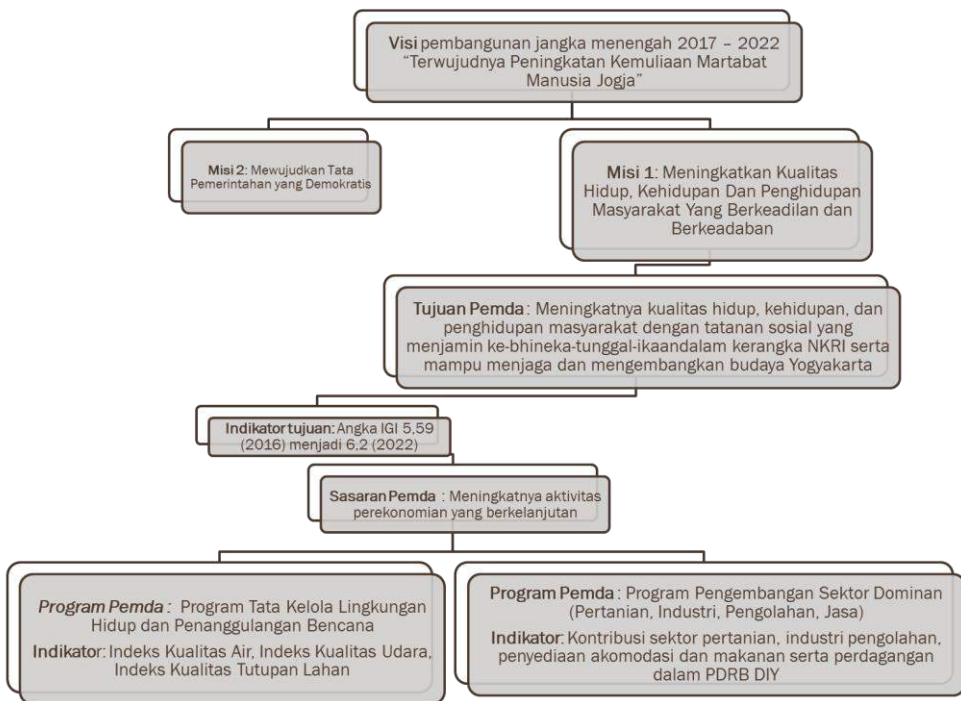
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

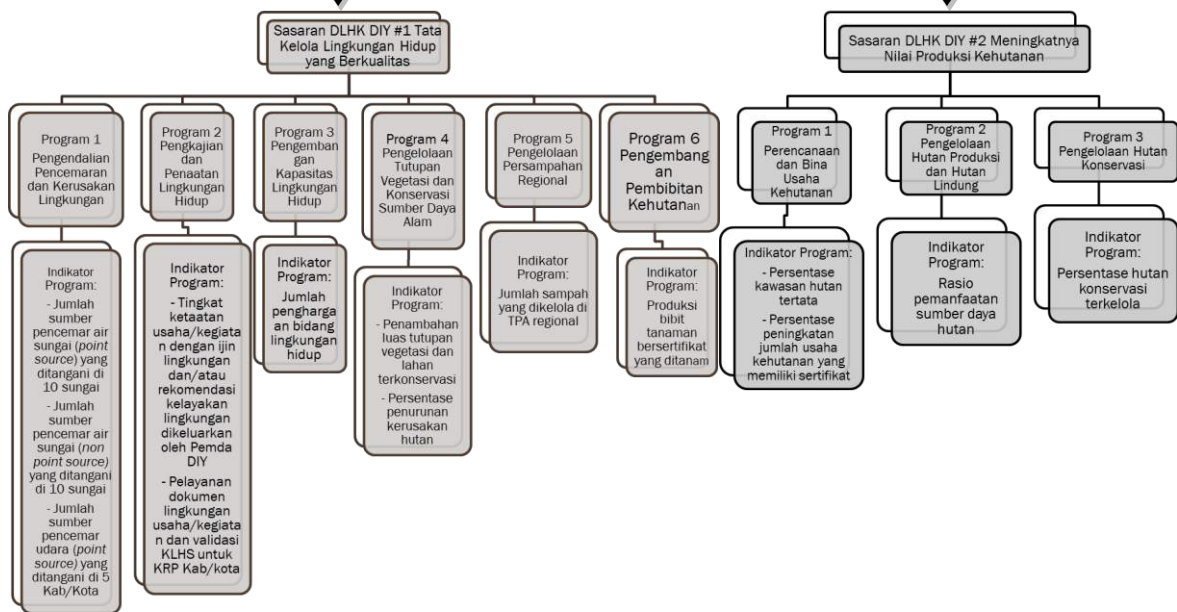
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar I.1 Cascading Kinerja**

**RPJMD DIY 2017 - 2022**



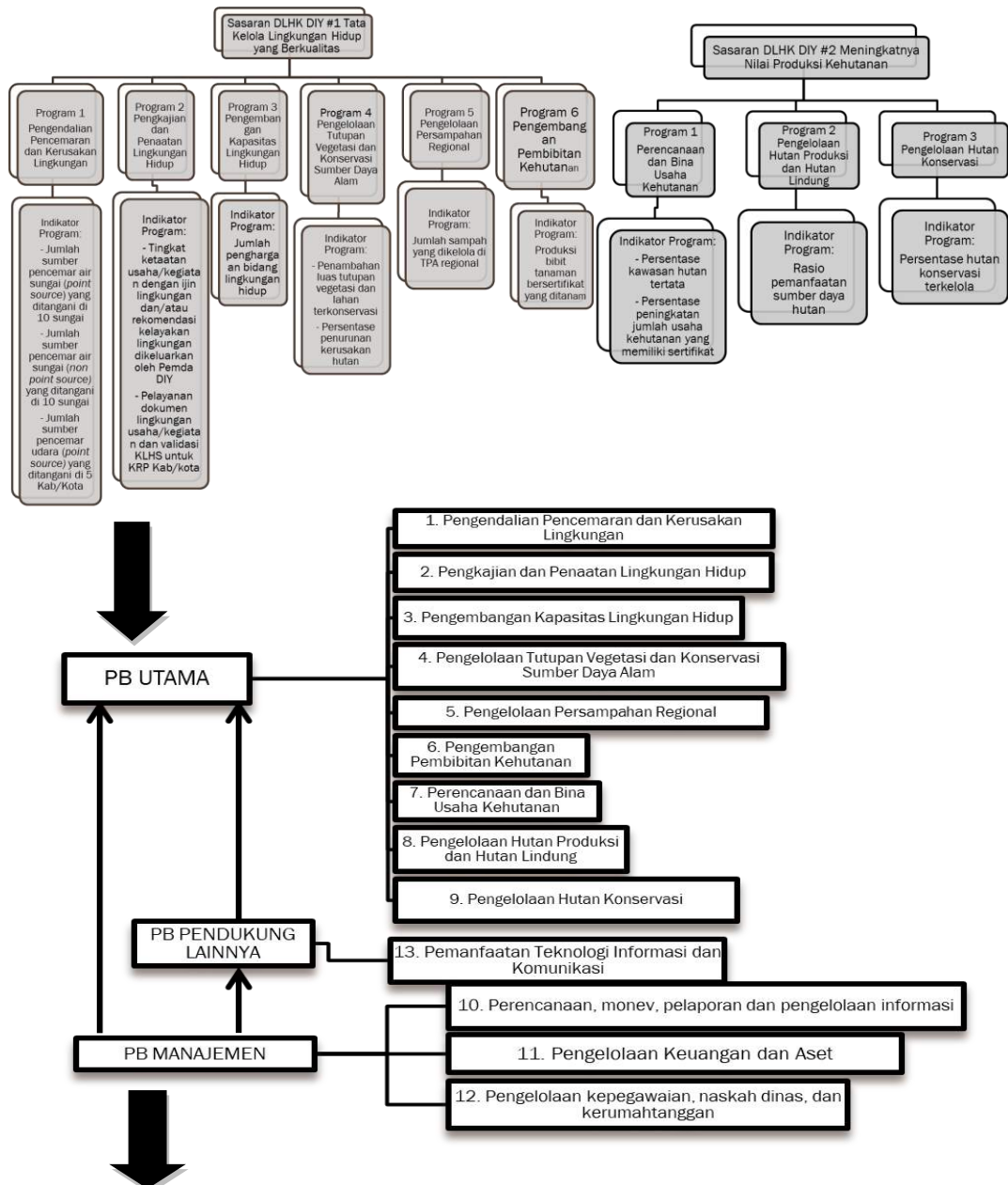
**RENSTRA DINAS 2017 – 2022**

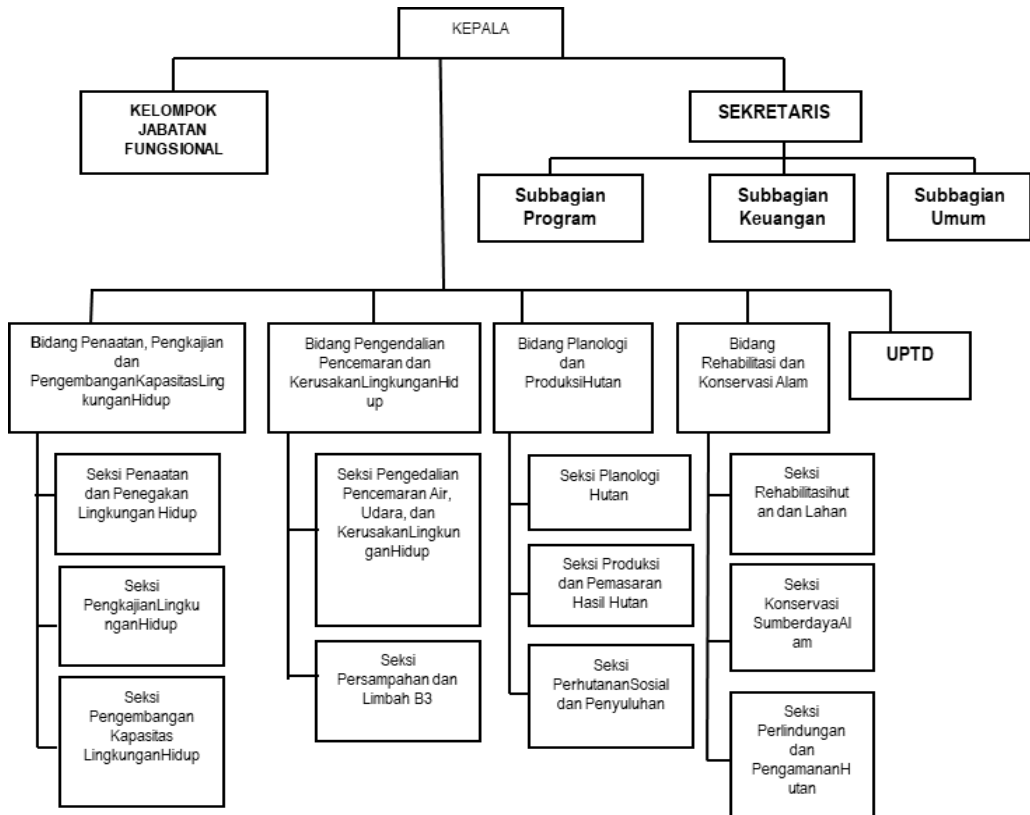


## 1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar I.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY**





Sumber: Perdas DIY No. 1 Tahun 2018, Pergub DIY No.59 Tahun 2018

### 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

**Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2018 tentang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi. Adapun fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai berikut

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;

4. Pembinaan pengendalian lingkungan hidup;
5. Pengelolaan keanekaragaman hayati;
6. Pembinaan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
7. Pengelolaan sampah di TPA/TPST regional;
8. Pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pengaduan dibidang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLingkungan Hidup);
9. Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan penataan lingkungan;
10. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
11. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
12. Pemberdayaan masyarakat dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
13. Pelaksanaan keplanologian, produksi hutan dan pemasarannya;
14. Pelaksanaan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan;
15. Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), perhutanan sosial dan penyuluhan kehutanan;
16. Fasilitasi rehabilitasi dan pemanfaatan lahan di tanah Kasultanan (SG) dan tanah Kadipaten (PAG) melalui pengembangan kehutanan;
17. Pengelolaan kawasan hutan;
18. Pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan negara;
19. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di bidang kehutanan;
20. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
21. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Sekretaris               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasubag Keuangan</li> <li>2) Kasubag Umum</li> <li>3) Kasubag Program</li> </ol> </li> <li>3. Kabid Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kasi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</li> <li>2) Kasi Pengkajian Lingkungan Hidup</li> <li>3) Kasi Pengembangan Kapasitas</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dibawah Kasubag Keuangan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bendahara</li> <li>2) Pengelola Gaji</li> <li>3) Pengadministrasi Keuangan</li> <li>4) Pengelola Akuntansi</li> <li>5) Verifikator Data Laporan Keuangan</li> </ol> </li> <li>2. Dibawah Kasubag Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelola Barang Milik Negara</li> <li>2) Pengadministrasi Kepegawaian</li> <li>3) Pengadministrasi Persuratan</li> <li>4) Pranata Kearsipan</li> <li>5) Teknisi Sarana dan Prasarana</li> <li>6) Pengadministrasi Umum</li> <li>7) Pengemudi</li> </ol> </li> </ol>

<p>4. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1) Kasi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>2) Kasi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>5. Kabid Planologi dan Produksi Hutan</p> <p>1) Kasi Planologi Hutan</p> <p>2) Kasi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan</p> <p>3) Kasi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan</p> <p>6. Kabid Rehabilitasi dan Konservasi Alam</p> <p>1) Kasi Rehabilitasi dan Konservasi alam</p> <p>2) Kasi Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>3) Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p> <p>7. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta</p> <p>1) Kasubag Tata Usaha</p> <p>2) Kasi Perencanaan dan Reboisasi</p> <p>3) Kasi Pemanfaatan Hutan</p> <p>8. Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder</p> <p>1) Kasubag Tata usaha</p> <p>2) Kasi Perencanaan dan Restorasi</p> <p>3) Kasi Pemanfaatan</p> <p>9. Kepala Balai Laboratorium Lingkungan</p> <p>1) Kasubag Tata Usaha</p> <p>2) Kasi Pengendali Mutu</p> <p>3) Kasi Pengujian</p> <p>10. Kepala Balai Perbenihan Kehutanan</p> <p>1) Kasubag Tata Usaha</p> <p>2) Kasi Pengembangan Perbenihan</p> <p>3) Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan</p> <p>11. Kepala Balai Pengelolaan Sampah</p> <p>1) Kasubag Tata Usaha</p> <p>2) Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan</p> <p>3) Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir</p> <p>12. Penyuluh Kehutanan Penyelia</p> <p>13. Penyuluh Kehutanan Muda</p>	<p>3. Dibawah Kasubag Program</p> <p>1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>2) Pengelola Sistem dan Jaringan</p> <p>3) CPNS : Pengelola Informasi Lingkungan</p> <p>4. Dibawah Kasi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan</p> <p>1) Analis Lingkungan Hidup</p> <p>2) Pengadministrasi Umum</p> <p>5. Dibawah Kasi Pengkajian Lingkungan Hidup</p> <p>1) Analis Lingkungan Hidup</p> <p>6. Dibawah Kasi Pengembangan Kapasitas</p> <p>1) Penyuluh Lingkungan Hidup</p> <p>7. Dibawah Kasi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan</p> <p>2) Pengadministrasi Umum</p> <p>8. Dibawah Kasi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>1) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan</p> <p>9. Dibawah Kasi Planologi Hutan</p> <p>1) Analis Pengembangan Hutan</p> <p>2) Pengadministrasi Umum</p> <p>10. Dibawah Kasi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan</p> <p>1) Analis Pasar Hasil Hutan</p> <p>11. Dibawah Kasi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan</p> <p>1) Pengelola Permodalan dan Aneka Usaha Perhutanan Sosial</p> <p>12. Dibawah Kasi Rehabilitasi dan Konservasi alam</p> <p>1) Analis Hutan dan Lahan</p> <p>2) Pengadministrasi Umum</p> <p>13. Dibawah Kasi Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>1) Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi</p> <p>14. Dibawah Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan</p> <p>1) Analis Pengamanan Lingkungan</p> <p>15. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai KPH</p> <p>1) Pengadministrasi Persuratan</p> <p>2) Pengadministrasi Keuangan</p> <p>3) Pengadministrasi Kepegawaian</p> <p>4) Teknisi Sarana dan Prasarana</p> <p>5) Bendahara</p> <p>6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan</p> <p>7) Pengelola Akuntansi</p> <p>8) Pengelola Gaji</p> <p>9) Pengelola Barang Milik Negara</p> <p>10) Pranata Kearsipan</p> <p>11) Verifikator Data Laporan Keuangan</p> <p>16. Dibawah Kasi Perencanaan dan Reboisasi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Analis Pengembangan Hutan</p> <p>17. Dibawah Kasi Pemanfaatan Hutan</p> <p>1) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha Perhutanan Sosial</p>
---	---

14. Penyuluh Kehutanan Madya	2) Analis Pasar Hasil Hutan
15. Penyuluh Kehutanan Pertama	18. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai TAHURA Bunder
16. Polisi Kehutanan Penyelia	1) Teknisi Sarana dan Prasarana
17. Pelaksana	2) Pengadministrasi Kepegawaian
18. Pengendali Ekosistem Hutan Muda	3) Pengadministrasi Persuratan
19. Pengawas Lingkungan Hidup Muda	4) Pengelola Barang Milik Negara
20. Calon Pengawas Lingkungan Hidup	5) Pengadministrasi Keuangan
21. Pengendali Dampak Lingkungan Madya	19. Dibawah Kasi Perencanaan dan Restorasi
22. CPNS : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli Pertama	1) Analis Rehabilitasi dan Konservasi
23. Polisi Kehutanan Terampil	20. Dibawah Kasi Pemanfaatan
24. CPNS : Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	1) Petugas Keamanan
25. Perakayasa Pertama	2) Analis Pengembangan Hutan
26. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama	21. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan
	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	2) Teknisi Sarana dan Prasarana
	3) Pengadministrasi Kepegawaian
	4) Pengadministrasi Keuangan
	22. Dibawah Kasi Pengendali Mutu
	1) Analis Penjamin Mutu
	2) CPNS : Analis Laboratorium
	23. Dibawah Kasi Pengujian
	1) Analis Pengujian
	2) CPNS : Analis Lingkungan Hidup
	24. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan
	1) Pengadministrasi Persuratan
	2) Teknisi Sarana dan Prasarana
	3) Pengadministrasi Kepegawaian
	4) Pengadministrasi Keuangan
	5) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	25. Dibawah Kasi Pengembangan Perbenihan
	1) Pengelola Teknologi Perbenihan
	26. Dibawah Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan
	1) Analis Benih
	27. Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah
	1) Pengadministrasi Persuratan
	2) Pengadministrasi Keuangan
	3) Pengelola Akuntansi
	28. Dibawah Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan
	1) Pengawas Lapangan Angkutan Sampah
	2) Pengelola Sampah
	29. Dibawah Kasi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir
	1) CPNS : Pengelola Sampah

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

#### 1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal

maupun lingkungan internal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan:

- 1. Meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas**
- 2. Mewujudkan tata kelola hutan lestari**

Adapun isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY antara lain sebagai berikut:

1. Alih Fungsi Lahan

Berkurangnya lahan terbuka menjadikan keseimbangan siklus hidrologi menjadi terganggu. Hal ini di satu sisi menjadi ancaman bencana banjir sebagai akibat meningkatnya aliran permukaan. Sementara di sisi lain akibat berkurangnya resapan air ke dalam tanah maka menimbulkan ancaman bencana kekeringan.

2. Pencemaran Air

Berdasarkan perhitungan dengan metode indeks pencemaran dan metode storet dihubungkan dengan kualitas air sungai hasil ketetapan Gubernur DIY diketahui bahwa pencemaran air di 10 sungai di DIY berada dalam kondisi tercemar. Parameter bakteri koli tinja (*Fecal coliform*) dan total koli (*Total coliform*) memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemar. Tingginya parameter bakteri koli menunjukkan bahwa limbah domestik belum tertangani dengan baik.

3. Pengelolaan Sampah

Penggunaan plastik dan bahan non organik lainnya yang belum terkendali (belum ada regulasi, insentif/disinsentif maupun gerakan masif terkait pengurangan sampah jenis tersebut) mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di TPST Piyungan. Selain pendekatan preventif berupa sistem pengelolaan sampah melalui prinsip 3R, perlu adanya penerapan pengelolaan sampah di TPST Piyungan yang mengadopsi teknologi tinggi namun tetap ramah lingkungan.

4. Kerusakan Lahan Akibat Aktivitas Penambangan Tanpa Izin

Kegiatan tambang tanpa izin yang terjadi di empat kabupaten di DIY didominasi oleh pertambangan batu, pasir, dan tanah urug. Pada masing-masing area tambang meninggalkan bekas-bekas lubang galian dan berpotensi menyebabkan terjadinya longsor. Bekas-bekas galian menjadikan lahan area tambang menjadi rusak dan juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, misalnya jalan di sekitar area tambang sebagai akibat dilalui truk-truk pembawa hasil galian.

5. Pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Hingga tahun 2018, perhitungan nilai PDRB subsektor kehutanan masih bertumpu pada produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini mengesankan bahwa kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB masih bersifat ekstraktif. Padahal, pada kenyataannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan jasa lingkungan hutan kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan nilai PDRB subsektor kehutanan dengan strategi dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau memastikan struktur perekonomian daerah dapat tersaji secara lebih realistis dan berkelanjutan.

6. Resolusi Permasalahan Tenurial

Konflik tenurial pada areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan di DIY. Ketidaksiapan calon lahan pengganti untuk proses tukar menukar kawasan hutan, penyerobotan lahan akibat kondisi sosial masyarakat sekitar kawasan bergantung terhadap hutan, penggunaan lahan tanpa izin, dan aksi sabotase terhadap tanda batas kawasan hutan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam menyelesaikan berbagai konflik tenurial tersebut di atas. Sementara itu ketersediaan alat ukur pemetaan yang kurang dalam hal akurasi dan perangkat komputer pemetaan yang kurang memadai mengakibatkan proses pemetaan harus dilakukan dengan lebih teliti dan berulang kali untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.

7. Penyediaan Bibit Kehutanan yang Berkualitas

Minyak kayu putih merupakan komoditas penyumbang PAD terbesar yang dapat dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Saat ini pemenuhan kebutuhan bibit kayu putih masih dilakukan secara mandiri sehingga kualitas bibit merupakan salah satu faktor dalam mengoptimalkan produktivitas minyak kayu putih. Selain itu, banyak benih/bibit yang beredar dimasyarakat belum terjamin mutu dan kualitasnya. Dengan ketersediaan bibit kehutanan tersertifikasi dan berkualitas, maka akan dapat menjamin produktivitas minyak kayu putih yang dihasilkan serta secara umum dapat mengoptimalkan peningkatan tutupan vegetasi.

### **1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin**

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Jabatan Struktural</b>							
1.	Kepala Dinas	1	S1,S2	1	S2	√	
2.	Sekretaris	1	S1	0	PLT	-	-
3.	Kasubbag Keuangan	1	S1	1	S1		√
4.	Kasubbag Umum	1	S1	0	PLT	-	-
5.	Kasubbag Program	1	S1	1	S2		√
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam	1	S1	1	S2		√
7.	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam	1	S1	1	S2	√	
8.	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1	S1	1	S2	√	
9.	Kepala Seksi Pengamanan Hutan	1	S1	1	S1		√
10.	Kepala Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	S1	1	S2	√	
11.	Ka Seksi Pengembangan Kapasitas	1	S1	1	S1	√	
12.	Ka Seksi Penaatan	1	S1	1	S1		√
13.	Ka Seksi Kajian Lingkungan	1	S1	1	S2	√	
14.	Ka Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	S1	1	S2	√	
15.	Ka Seksi Sampah dan Limbah B3	1	S1	1	S1		√
16.	Ka Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara	1	S1	1	S1		√
17.	Ka Bidang Planologi dan Produksi Hutan	1	S1	1	S2	√	
18.	Ka Seksi Planologi Hutan	1	S1	1	S1	√	
19.	Ka Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan	1	S1	1	S1	√	
20.	Ka Seksi Perhutanan Sosial	1	S1	1			√
21.	Ka Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta	1	S1	1	S2	√	
22.	Kasubbag Tata Usaha Balai KPH	1	S1	1	S1	√	
23.	Ka Seksi Perencanaan Balai KPH	1	S1	1	S1	√	
24.	Ka Seksi Pemanfaatan Balai KPH	1	S1	1	S1	√	
25.	Ka Balai Tahura Bunder	1	S1	1	S2		√
26.	Kasubbag TU Balai Tahura Bunder	1	S1	1	S1	√	
27.	Ka Seksi Perencanaan Balai Tahura Bunder	1	S1	1	S1	√	
28.	Ka Seksi Seksi Pemanfaatan Balai Tahura Bunder	1	S1	1	S1	√	
29.	Ka Balai Perbenihan Kehutanan (BBH)	1	S1	1	S2	√	
30.	Kasubbag Tata Usaha BBH	1	S1	1	S1	√	
31.	Ka Seksi Pengembangan Perbenihan BBH	1	S1	1	S1		√
32.	Ka Seksi Sertifikasi BBH	1	S1	1	S1	√	
33.	Ka Balai Pengelolaan Sampah	1	S1	1	S2	√	
34.	Kasubbag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah	1	S1	1	S1		√
35.	Ka Seksi Pengangkutan	1	S1	0	-	-	-

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
	2	3	4	5	6	7	8
36.	Ka Seksi Pemrosesan Akhir	1	S1	1	S1	√	
37.	Ka Balai Laboratorium Lingkungan	1	S1	1	S2		√
38.	Kasubbag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan	1	S1	1	S1	√	
39.	Ka Seksi Pengujian	1	S1	1	S1		√
40.	Ka Seksi Pengendali Mutu	1	S1	1	S1		√
<b>B. Jabatan Fungsional Tertentu</b>							
1.	Penyuluh Kehutanan Penyelia	44	SMA	12	S1, D3, SMA	√	√
2.	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan			1	S1	√	
3.	Penyuluh Kehutanan Muda		S1	4	S1, D4	√	√
4.	Penyuluh Kehutanan Madya	12	S1,S2	7	S2, S1	√	√
5.	Penyuluh Kehutanan Pertama		S1	1	S1	√	√
6.	Polisi Kehutanan Penyelia	1	D3,S1	10	SMA,S1	√	
7.	Pengendali Ekosistem Hutan Pertama	4	S1	5	S1,S2	√	√
8.	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	4	S1	1	S1		√
9.	Calon Pengawas Lingkungan Hidup		S1	2	S1		√
10.	Pengendali Dampak Lingkungan Madya	3	S1	1	S2	√	
11.	Polisi Kehutanan Pelaksana Perekayasa Pertama			3	D3	√	√
				1	S1	√	
<b>C. Jabatan Fungsional Umum</b>							
	Dibawah Kasubag Keuangan						
1.	Bendahara	2	S1	2	S1,SMA		√
2.	Pengelola Gaji	1	D3	1	S1		√
3.	Pengadministrasi Keuangan	4	SMA	4	SMA, S1	√	√
4.	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	S2	√	
5.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	SMA		√
6.	Dibawah Kasubag Umum						
7.	Pengelola Barang Milik Negara	4	D3	2	SMA	√	
8.	Pengadministrasi Kepegawaian	2	SMA	2	S1, SMP	√	√
9.	Pengadministrasi Persuratan	1	SMA	1	SMP	√	
10.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	S1		√
11.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	S1	√	
12.	Pengadministrasi Umum	1	D3	1	SMA		√
13.	Pengemudi	1	SMA	1	SMA	√	
	Dibawah Kasubag Program						
1.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4	D3	4	S1,S2	√	√
2.	Pengelola Sistem dan Jaringan	1	D4,S1	1	S2	√	
	Dibawah Kasi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan						
1.	Analisis Lingkungan Hidup	4	S1, D4	3	D4,S1,S2	√	√
2.	Pengadministrasi Umum	1	D3	1	D3	√	
	Dibawah Kasi Pengkajian Lingkungan Hidup						
1.	Analisis Lingkungan Hidup	4	S1, D4	3	S1	√	√
	Dibawah Kasi Pengembangan Kapasitas						

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyuluh Lingkungan Hidup	4	S1, D4	2	SMP,S1	√	√
	Dibawah Kasi Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup						
1.	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	4	S1, D4	2	S1,S2		√
2.	Pengadministrasi Umum	1	D3	1	STM	√	
	Dibawah Kasi Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun						
1.	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	4	S1, D4	3	S2, S1,SMA	√	√
	Dibawah Kasi Planologi Hutan						
1.	Analisis Pengembangan Hutan	4	S1	3	SMA, D4,S1	√	
2.	Pengadministrasi Umum	1	D3	1	SMA		√
	Dibawah Kasi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan						
1.	Analisis Pasar Hasil Hutan	4	S1	4	S1	√	√
2.	Dibawah Kasi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan						
1.	Pengelola Permodalan dan Aneka Usaha Perhutanan Sosial	4	S1	4	SMA,D4,S1	√	√
	Dibawah Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan						
1.	Analisis Hutan dan Lahan	4	S1	4	SMA,S1,S2	√	√
2.	Pengadministrasi Umum	1	D3	1	SMA		√
	Dibawah Kasi Konservasi Sumber Daya Alam						
1.	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	4	S1	4	SKMA,S1,S2	√	√
	Dibawah Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan						
1.	Analisis Pengamanan Lingkungan	3	S1	4	SMA,S1	√	√
	Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai KPH						
1.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMA	√	
2.	Pengadministrasi Keuangan	4	D3	6	SMP, SMA,S1	√	√
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	2	D3	2	SMA,S2		√
4.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	2	SMP	√	
5.	Bendahara (Pembantu)	2	S1	2	SMA,S1		√
6.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4	D4,S1	1	S1	√	
7.	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	S1	√	
8.	Pengelola Gaji	1	D3	1	S1	√	
9.	Pengelola Barang Milik Negara	4	D3	2	SMA,S1	√	
10.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	SMA	√	
11.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	1	SMA		√
	Dibawah Kasi Perencanaan dan Reboisasi						
1.	Koordinator			69	SD, SMA,S1	√	
2.	Analisis Pengembangan Hutan	4	S1	1	S1	√	
	Dibawah Kasi Pemanfaatan Hutan						

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha Perhutanan Sosial			11	SD,SMP,SMA,S1	√	
2.	Analisis Pasar Hasil Hutan	4	S1	2	SMA, S1	√	
	Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai TAHURA Bunder						
1.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMP	√	
2.	Pengadministrasi Kepegawaian	2	D3	1	SMA	√	
3.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	D3	√	
4.	Pengelola Barang Milik Negara	4	D3	1	S1	√	
5.	Pengadministrasi Keuangan	4	D3	1	S1	√	
6.	Penyusun Program	4	D4,S1	1	S1		√
	Dibawah Kasi Perencanaan dan Restorasi						
1.	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi			4	SMA, S1	√	
	Dibawah Kasi Pemanfaatan						
1.	Petugas Keamanan			4	SD, SMA	√	
2.	Analisis Pengembangan Hutan	4	S1	2	SMA,S1	√	√
	Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan						
1.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4	D4,S1	1	S1	√	
2.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMA	√	
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	2	D3	1	SMA		√
4.	Pengadministrasi Keuangan	4	D3	1	SMP		
5.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SD	√	
6.	Pelaksana			1	S1		√
	Dibawah Kasi Pengendali Mutu						
1.	Analisis Penjamin Mutu			2	S1	√	√
	Dibawah Kasi Pengujian						
1.	Analisis Pengujian			1	S2		√
	Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan						
1.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMA	√	
2.	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMA	√	
3.	Pengadministrasi Kepegawaian	2	D3	1	SMA	√	
4.	Pengadministrasi Keuangan	4	D3	1	D3		√
5.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4	D4,S1	1	S1	√	
	Dibawah Kasi Pengembangan Perbenihan						
1.	Pengelola Teknologi Perbenihan			4	SMP, SMA, S1	√	√
	Dibawah Kasi Sertifikasi Benih dan Kehutanan						
1.	Analisis Benih			4	SMA, S1	√	√
	Dibawah Kasubag Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah						
1.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMA		√
2.	Pengadministrasi Keuangan	4	D3	1	S1	√	
3.	Pengelola Akuntansi	1	D3	1	SMA		√
	Dibawah Kasi Pengumpulan dan Pengangkutan						
1.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah			1	SMA	√	
	Dibawah Kasi Pengolahan dan						

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemrosesan Akhir						
1.	Pengelola Sampah			1	SMA	√	
	<b>CPNS</b>						
1.	Analisis Perencanaan Anggaran			1	S1	√	
2.	Pengelola Informasi Lingkungan			1	D4		√
3.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama			1	S1		√
4.	Penyuluh Lingkungan Hidup	4	S1, D4	1	S1	√	
5.	Penyuluh Kehutanan Pertama			3	D3,S1		√
6.	Polisi Kehutanan			2	S1	√	
7.	Analisis Laboratorium			1	S1		√
8.	Analisis Lingkungan Hidup	4	S1, D4	1	S1		√
	<b>Pegawai Yang Dibebastugaskan</b>						
1.	Tugas Belajar			1	S1		√
2.	Cuti di Luar Tanggungan Negara			1	D4	√	
				307			

Sumber: Data Terpilah Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY relatif proporsional dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 118 orang (38,43%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 33 orang (10,74%), D4 7 orang (2,28%), D3 4 orang (1,30%), setara SLTA 117 orang (38,11%), setara SLTP 19 orang (6,18%), setara SD 9 orang (2,93%) . Rasio pejabat struktural berjenis kelamin laki – laki dibanding perempuan sebesar 23:14. Hingga akhir tahun 2019, jabatan struktural yang belum terisi karena pejabat sebelumnya purna tugas adalah Sekretaris, Ka subbag Umum (diisi oleh pejabat pelaksana tugas) dan Ka Seksi Pengangkutan (tanpa pejabat pelaksana tugas). Meskipun demikian, secara umum komposisi dan jumlah pegawai tersebut di atas telah sesuai dengan beban pekerjaan/kebutuhan.

**Tabel I.2 Sarana-Prasarana**

Gol.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp) <sup>1)</sup>
<b>01</b>	<b>TANAH</b>	<b>41</b>	<b>37.432.470.972,00</b>
01.01	Tanah	41	37.432.470.972,00
<b>02</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>2.953</b>	<b>49.071.376.181,92</b>
02.02	Alat – alat Besar	82	22.404.776.172
02.03	Alat – alat Angkutan	188	5.606.267.365
02.04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	104	748.952.029
02.05	Alat Pertanian	22	142.362.500
02.06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.007	7.538.540.973
02.07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	272	1.535.922.933
02.08	Alat – alat Kedokteran	0	0
02.09	Alat Laboratorium	276	11.088.054.210
02.10	Alat – alat persenjataan/Keamanan	2	6.500.000
<b>03</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>151</b>	<b>38.318.459.229,00</b>
03.11	Bangunan Gedung	148	38.004.499.349

Gol.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp) <sup>*)</sup>
03.12	Monumen	3	313.959.880
<b>04</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>128</b>	<b>26.973.731.679,00</b>
04.13	Jalan dan Jembatan	50	13.465.207.781
04.14	Bangunan Air/Irigasi	30	12.450.055.346
04.15	Instalasi	28	603.790.027
04.16	Jaringan	20	454.678.525
<b>05</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>3.890</b>	<b>1.128.499.187,00</b>
05.17	Buku Perpustakaan	3.793	187.658.701
05.18	Barang Bercorak Kebudayaan	90	30.600.000
05.19	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	7	910.240.486
05.20	Aset Tetap Renovasi	0	0
<b>06</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
06.21	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
<b>07</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>20</b>	<b>7.033.393.750,00</b>
07.22	Aset Tidak Berwujud	20	7.033.393.750
	Jumlah	7.183	159.957.930.998,92

<sup>\*)</sup>Nilai aset sudah memperhitungkan penyusutan di tahun 2019

Sumber: Data Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2019

Kendaraan dinas terdiri dari yakni:

1. Dinas induk memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda enam, 18 (delapan belas) unit kendaraan roda empat, 3 (tiga) unit kendaraan roda tiga, dan 77 (tujuh puluh tujuh) unit kendaraan roda dua.
2. Balai KPH Yogyakarta memiliki 3 (tiga) unit unit kendaraan roda empat, 74 (tujuh puluh empat) unit kendaraan roda dua

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun UPTD yang tersebar di 4 kabupaten. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing – masing bidang dan seksi sudah menempati kantor/ruang masing – masing. Selain itu juga terdapat 4 (empat) aula, ruang arsip, perpustakaan, mushola, gudang, ruang tamu, ruang laktasi, dan toilet di masing – masing bidang/balai. Selain itu Dinas juga memiliki dua pabrik minyak kayu putih, 5 kantor BDH, kantor RPH dan laboratorium. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

**Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2018 dan 2019**

Tahun		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1		2	3	4
2018	BLH DIY	Rp. 2.981.929.828,00	Rp.25.157.533.425,00	Rp. 28.139.463.253,00
	Dishutbun DIY	Rp.21.671.801.204,00	Rp.19.584.534.979,00	Rp. 41.256.336.183,00
	<b>Total</b>	<b>Rp.24.653.731.032,00</b>	<b>Rp.44.742.068.404,00</b>	<b>Rp. 69.395.799.436,00</b>
2019		<b>Rp.21.426.406.970,00</b>	<b>Rp.49.732.083.860,00</b>	<b>Rp.71.158.490.830,00</b>

Secara umum, terjadi kenaikan anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp.3.227.324.062,00 karena ini terkait beberapa hal seperti berkurangnya jumlah pegawai baik yang dimutasi maupun yang memasuki purna tugas. Sedangkan untuk belanja langsung, terjadi kenaikan sebesar Rp.4.990.015.456,00. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas.

**Tabel I.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2018**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur DIY Nomor : 700/01372 tanggal 6 Mei 2019, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY memperoleh nilai sebesar 78,59 kategori BB dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal</li> <li>Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY beserta seluruh jajarannya agar lebih optimal dalam mencapai <i>output</i> dan <i>outcome</i> kegiatan yang ditargetkan dan</li> </ol>	<p>Upaya yang dilakukan sebagai langkah tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan rutin pegawai yang dilakukan seminggu sekali dalam bentuk apel, pertemuan pejabat eselon II-III seminggu sekali maupun pembinaan rutin subbag/seksi yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali yang dilaporkan dalam <i>form</i> DIARINDU;</li> <li>Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup DIY Tahun 2017-2022 untuk menyelaraskan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan RPJMD DIY 2017 – 2022;</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan</li> </ol>

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
	memperhatikan kesesuaian Renstra, Renja dan LAKIP.	
2.	<p>Surat Inspektur DIY            Nomor : 700/01368 tanggal 6 Mei 2019,            perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Badan Lingkungan Hidup DIY.</p> <p>Substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Lingkungan Hidup DIY memperoleh nilai sebesar 80,27% kategori A dengan interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel;</li> <li>2. Telah mempertahankan atas kinerja yang dilaporkan (Indikator Kinerja Utama) dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;</li> <li>3. Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan atas ketercapaian kinerja <i>Output</i>, <i>Outcome</i> dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.</li> </ol>	<p>Kehutanan DIY berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi dengan mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta melaksanakan evaluasi atas pencapaian output/outcome secara periodik baik mingguan, bulanan, dan triwulanan.</p>

# BAB 2

## Perencanaan

## dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :*

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan 2019
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2019 merupakan tahun pertama penerapan Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*). Melalui Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY didesain paralel (*inline*) dengan alur (*cascading*) kinerja visi, misi, tujuan, sasaran, program Pemda, dan program OPD yang diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodir dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai cascade kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan sinergi dan efektivitas upaya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mewujudkan tata kelola hutan lestari

Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2017-2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	85,64	88,56	91,47	94,39	97,02	100	100
2.	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	720.236	734.713	742.060	749.480	756.975	764.545	764.545

Sumber : Cascading RPJMD DIY 2017 – 2022

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	1. Melaksanakan pengkajian dan penataan lingkungan hidup	a. Melaksanakan penataan dan penegakan hukum lingkungan terpadu b. Melaksanakan pengkajian lingkungan hidup
	2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Mengendalikan pencemaran air, udara dan tanah b. Mengelola sampah dan limbah B3
	3. Mengembangkan kapasitas lingkungan hidup	a. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup b. Meningkatkan mutu laboratorium lingkungan c. Melaksanakan pengujian parameter

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kualitas lingkungan
	4. Mengelola tutupan vegetasi dan konservasi Sumber Daya Alam	a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan b. Melaksanakan konservasi sumberdaya alam c. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan
	5. Melaksanakan pengelolaan persampahan regional	a. Melaksanakan pengelolaan pengumpulan dan pengangkutan sampah b. Mengelola sarana dan prasarana penanganan sampah regional
	6. Mengembangkan pembibitan kehutanan	a. Mengembangkan perbenihan tanaman kehutanan b. Melaksanakan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih bibit tanaman
Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	1. Melaksanakan perencanaan dan bina usaha kehutanan	a. Mengelola perhutanan sosial b. Melaksanakan penatausahaan produksi hasil hutan c. Melakukan penataan hutan
	2. Mengelola hutan produksi dan hutan lindung	a. Melakukan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan b. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya hutan
	3. Melaksanakan pengelolaan hutan konservasi	a. Melaksanakan Pengelolaan Tahura Bunder b. Mengembangkan pelayanan pemanfaatan Tahura

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup DIY 2017 – 2022

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan 2019

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

**Tabel II.3.1. Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2019**

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1. Terwujudnya tata kelola lingkungan	1.1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2.213.360.600

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
hidup yang berkualitas	1.1.1. Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Tanah	1.569.386.600
	1.1.2. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	643.974.000
	1.2. Program Pengkajian dan Penaatan Lingkungan Hidup	<b>1.585.290.200</b>
	1.2.1. Pengkajian Lingkungan Hidup	1.281.935.600
	1.2.2. Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	303.354.600
	1.3. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	<b>2.546.713.870</b>
	1.3.1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup	1.376.430.870
	1.3.2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	1.170.283.000
	1.4. Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumberdaya Alam	<b>13.282.964.170</b>
	1.4.1. Peningkatan Tutupan Vegetasi	2.496.698.000
	1.4.2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	7.716.602.670
	1.4.3. Konservasi Sumberdaya Hutan	777.538.000
	1.4.4. Pengamanan Hutan	299.907.500
	1.4.5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	1.992.218.000
	1.5. Program Pengelolaan Persampahan Regional	<b>8.736.996.000</b>
	1.5.1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	8.736.996.000
	1.6. Program Pengembangan Pembibitan Kehutanan	562.148.000
	1.6.1. Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	504.508.000
	1.6.2. Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan	57.640.000
		<b>Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 1</b>
2.Meningkatnya nilai produksi kehutanan	2.1. Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan	<b>751.573.000</b>
	2.1.1. Penataan Hutan	314.984.000
	2.1.2. Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	126.704.000
	2.1.3. Pengelolaan Perhutanan Sosial	309.885.000
	2.2. Program Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<b>8.600.780.200</b>
	2.2.1. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	414.995.000
	2.2.2. Perlindungan Hutan	720.105.000
	2.2.3. Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	7.465.680.200
	2.3. Program Pengelolaan Hutan Konservasi	<b>1.573.274.500</b>
	2.3.1. Operasional Teknis Pengelolaan Tahura	179.995.000

Sasaran	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
	Bunder	
	2.3.2. Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	1.393.279.500
	Total Anggaran yang Mendukung Sasaran 2	10.925.627.700
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>		<b>39.853.100.540</b>

**Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2019**

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
	<b>Dinas Induk</b>	
<b>1.</b>	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>	<b>5.267.044.120</b>
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.563.038.720
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3.004.157.900
	1.3. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	699.847.500
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4.052.801.500</b>
	2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	888.019.000
	2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	848.500.000
	2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	699.872.500
	2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	202.590.000
	2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.413.820.000
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>26.364.000</b>
	3.1. Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	26.364.000
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan</b>	<b>532.773.700</b>
	4.1. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	19.653.500
	4.2. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.388.200
	4.3. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	445.000.000
	4.4. Monitoring dan Evakuasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	37.732.000
	<b>Balai KPH Yogyakarta</b>	
<b>1.</b>	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.967.397.750</b>
	1.1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	359.828.850
	1.2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.489.400.900
	1.3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	118.168.000
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>833.413.500</b>
	2.1. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	205.146.000
	2.2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	32.500.000
	2.3. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	204.247.500
	2.4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	7.300.000
	2.5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	384.220.000

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
	<b>Total Anggaran Pendukung</b>	<b>12.679.794.570</b>

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

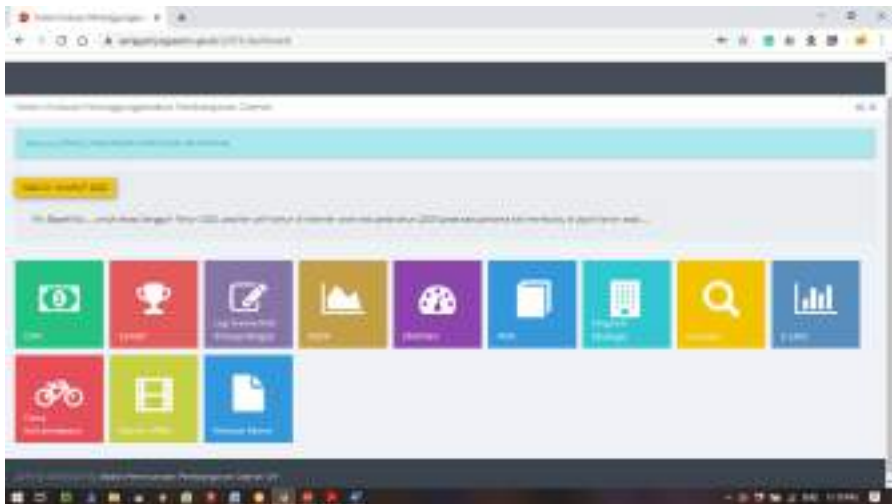
**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	91,47	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	91,47
2.	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	742.060	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	742.060

#### 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi [sungguh.jogjaprov.go.id](http://sungguh.jogjaprov.go.id) yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY juga memiliki aplikasi database LHK untuk mendukung rekapitulasi IKLH Tahun 2019.

Gambar II.5. Aplikasi Pendukung Capaian Kinerja



Sumber:<http://sungguh.jogjaprov.go.id/>



Sumber:<http://dlhk.jogjaprov.go.id/databaselh>

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2019*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Inovasi*

### **3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019**

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2019. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

**Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	Base line 2017	Capaian 2018	TAHUN 2019				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4			5	6	7	8	
1	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	<u>Indikator:</u> Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup  <u>Meta Indikator:</u> Capaian IKLH tahun N yang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%	%	85,64	93,26	91,47	93,41	102,12	Sangat Baik	100
2	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	<u>Indikator:</u> Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY  <u>Meta Indikator:</u> Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)	Juta rupiah	720.236	1.020262.4	742.060	1.020262.4*)	137,49	Sangat Baik	764.545

\*) Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2019 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan capaian tahun 2018)

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**3.1.1. Sasaran 1: Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas**

Tolok ukur capaian sasaran **Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas** diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	Capaian IKLH tahun N yang tercapai/target IKLH pada tahun akhir RPJMD x 100%

Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra dikalikan 100%.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air 10 sungai di Kabupaten/Kota DIY;
2. Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode passive sampler di Kabupaten/Kota DIY;
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. IKTL ini diperoleh dari luasan tutupan vegetasi di DIY yang telah dikonversi berdasarkan ketentuan dari kementerian Lingkungan Hidup (KLHK).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah

$$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$$

Dengan demikian realisasi kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

No	Indikator Sasaran	Capaian 2018 (%)	2019			Target Akhir Renstra Tahun 2022 (%)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	93,26	91,47	92,29	100,90	100	92,29

Berdasarkan hasil penghitungan masing – masing indeks, diperoleh nilai IKLH untuk tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel III.5 Nilai IKLH dan Penghitungan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

Indikator Sasaran	Target	Realisasi
IKA	34,2	38,65
IKU	87,06	85,25
IKTL	55,5	59,70
<b>IKLH 2019</b>	60,51	61,05
<b>IKLH Tahun Terakhir Renstra</b>	66,15	<b>Belum tersedia</b>
<b>Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup 2019</b>	$\frac{60,51}{66,15} \times 100\%$	$\frac{61,05}{66,15} \times 100\%$
<b>Nilai realisasi IKLH 2019 x 100%</b> <b>Nilai Target IKLH 2022</b>	<b>91,47%</b>	<b>92,29%</b>

Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY, 2019

Berdasarkan tabel III.5, untuk persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup tahun 2018 sebesar 93,26%, maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada tahun 2019 menurun 0,97%. Akan tetapi, karena target kinerja tahun 2019 adalah 91,47% maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sudah berhasil memenuhi dengan persentase realisasi sebesar 100,89%. Sementara itu, persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian saat ini, masih terdapat selisih 7,71%.

**Tabel III.6 Capaian IKLH DIY Tahun 2017, 2018 dan 2019 dibandingkan dengan IKLH Nasional Tahun 2018**

	IKA	IKU	IKTL	IKLH
<b>DIY 2017</b>	33,9	88,08	35,6	50,83
<b>DIY 2018</b>	40,25	84,24	60,86	61,69
<b>DIY 2019</b>	38,65	85,25	59,90	61,13
<b>IKLH Nasional 2018</b>	72,77	84,74	61,03	71,67

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa nilai IKLH DIY selalu di bawah nilai IKLH Nasional. Nilai IKA dan IKTL DIY pada tahun 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Meskipun demikian, khusus untuk nilai IKU pada tahun 2019 kembali meningkat dan bahkan melebihi nilai IKU nasional.

### 3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase Ketercapaian Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup

Perhitungan IKA Tahun 2019 didasarkan pada data hasil pemantauan kualitas air sungai terhadap 7 parameter (BOD, DO, COD, TSS, PO4, bakteri koli tinja dan bakteri Koli total). Pemantauan dilakukan di 10 (sepuluh) sungai selama 3 (tiga) periode. Setiap periode terdiri dari 50 (lima puluh) titik, sehingga keseluruhan data yang ada 150 (seratus lima puluh) titik. Langkah perhitungan dilakukan melalui penentuan satu mutu air di setiap titik pemantauan. Indeks Kualitas Air (IKA) akan didapat setelah dihitung melalui pemenuhan mutu air dikalikan bobot nilai indeks.

**Tabel III.7 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air di DIY**

Nama Sungai	Nilai Indeks Pencemaran Air Periode I (Maret)	Nilai Indeks Pencemaran Air Periode II (Juni)	Nilai Indeks Pencemaran Air Periode III (September)	Rata-Rata Indeks Pencemaran Air (Per Sungai)
Winongo	47,5	42,5	40	43,333
Code	52,5	40	35	42,500
Gajahwong	40	27,5	22,5	30,000
Tambakbayan	50	35	45	43,333
Kuning	50	35	30	38,333
konteng	50	25	15	30,000
Bedog	50	34	38	40,667
Belik	50	30	29,997	36,666
Bulus	60	30	30	40,000
Oyo	50	30	45	41,667
<b>Nilai IKA Sungai DIY Per Periode</b>	<b>50</b>	<b>32,9</b>	<b>33,0497</b>	<b>38,650</b>
<b>Nilai IKA DIY 2019</b>	<b>38,65</b>			

Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY, 2019

Penghitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan dua parameter yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU daerah dihitung dari data pengukuran kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* di 20 titik pantau yang tersebar di kabupaten/kota di DIY, yang mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi Program *European Union* melalui *European Regional Development Fund* pada *Regional Initiative Project*, yaitu "*Common Information to European Air*" (Citeair II), yang digunakan sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per jam harian dan tahunan. Perhitungan indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar *European Union (EU) Directives*. Apabila nilai indeks >1, berarti kualitas melebihi standar EU. Sebaliknya apabila indeks ≤1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU. Indeks Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH.

**Tabel III.8 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Udara di DIY**

Parameter	Rerata Pemantauan 2019	Referensi EU	Index
NO <sub>2</sub>	13.53	40	0.338
SO <sub>2</sub>	7.85	20	0.393
<b>Index Udara</b>			0.365
<b>(Index Annual model EU-Ieu)</b>			
<b>Index Udara DIY 2019</b>			85.25

Sumber: Laporan IKLH DLHK DIY, 2019

Perhitungan IKTL diawali dengan melakukan perhitungan luas TH (Tutupan Hutan). Untuk itu, luas tutupan vegetasi selain hutan terlebih dahulu dilakukan konversi performa. Setelah luas hutan dan luas tutupan vegetasi terkonversi dijumlah, kemudian dibagi luas wilayah sehingga diketahui luas TH. Selanjutnya IKTL dihitung dengan rumus:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$$

Keterangan :

- 84,3 : tutupan hutan tertinggi di Papua
- TH : Tutupan Hutan (Tutupan vegetasi dan konversinya dibagi luas wilayah)
- 50 dan 54,3 : Konstanta

**Tabel III.9 Hasil Perhitungan IKTL DIY**

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)	Faktor konversi	Hasil Konversi
1.	Kawasan Hutan, terdiri dari:	19.133,7	1	19.133,7
	a. Hutan Lindung : 2.297,61 ha			
	b. Hutan Produksi : 13.519,47 ha			
	c. Hutan Konservasi: 3.316,88 1) CA : 11,88 ha 2) SMS : 619,82 ha 3) Taman Nasional: 2.050,05 ha 4) Taman Wisata Alam : 1,03 ha 5) Taman Hutan Raya : 634,1 ha			
2.	Hutan Rakyat	78.599,69	1	78.599,69
3.	Perkebunan	33.999,62	0,4	13.599,85
4.	Lahan pangan tak beririgasi	66.446,46	0,1	6.644,6
5.	Sempadan sungai	6.454,79	0,6	3.872,27
6.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.818,78	0,6	5.891,27
7.	Sempadan pantai	2.311,11	0,6	1.386,66
	JUMLAH	216,764,15		129.128
	LUAS DIY		318.600	
	Nilai TH DIY		0,4053004	
	Nilai IKLH DIY		<b>59,70</b>	

Sumber data : Laporan IKLH DLHK DIY, 2019

### 3.1.2. Sasaran meningkatnya nilai produksi kehutanan

Tolok ukur capaian sasaran **Meningkatnya nilai produksi kehutanan** diukur dengan 1 indikator. Indikator tersebut yaitu nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel III.10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY (Juta Rupiah)	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun n (ADHK)

Capaian nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2019 belum dirilis BPS DIY, sehingga capaian nilai PDRB sub

sektor kehutanan masih menggunakan angka tahun 2018. Kinerja sasaran meningkatnya nilai produksi kehutanan dengan indikator nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB (Juta Rupiah) pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

No	Indikator Sasaran	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB (Juta Rupiah)	1.020.262,4	742.060	1.020.262,4	137,49 %	764.545	133,44%

\*) Angka Sangat Sementara, capaian Tahun 2019 belum dirilis oleh BPS (Data menggunakan capaian tahun 2018)

Berdasarkan tabel III.11 kolom 5 realisasi nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 1020262.4 juta rupiah maka capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019 dengan persentase realisasi sebesar 137,49%. Sementara itu, nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY di tahun terakhir Renstra (2022) ditargetkan sebesar 764.545 juta rupiah. Maka jika dibandingkan dengan capaian saat ini, maka sudah surplus sebesar 33,44%.

### 3.1.1.2. Data Dukung Capaian Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan

Meskipun nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY tahun 2019 belum dapat ditampilkan, maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah berdasarkan data komponen penyumbang PDRB sub sektor kehutanan. Dengan membandingkan dengan data komponen penyumbang PDRB sub sektor kehutanan tahun 2018, diketahui bahwa capaian hasil tahun 2019 relatif lebih superior dibandingkan dengan capaian tahun 2018 seperti diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel III.12 Komponen Penyumbang PDRB Sub Sektor Kehutanan Tahun 2018 dan 2019**

No.	Uraian	Volume	
		2018	2019

No.	Uraian	Volume	
		2018	2019
1.	Produksi kayu bulat (m <sup>3</sup> )	120.235,40	154.210,56
2.	Produksi kayu olahan (m <sup>3</sup> )		
	a. Produksi <i>Bare Core</i> (m <sup>3</sup> )	13.789,56	15.788,8472
	b. Produksi <i>Moulding</i> (m <sup>3</sup> )	-	15,7180
	c. Produksi <i>Wood Working</i> (m <sup>3</sup> )	7.105,38	126,2976
	d. Produksi Kusen (m <sup>3</sup> )	-	119,2494
	e. Produksi Mebel (m <sup>3</sup> )	3.822,94	3.659,53
3.	Produksi hasil hutan non kayu		
	f. Minyak kayu putih (liter)	44.285	39.323
	g. Bambu (batang)	-	127.330
4.	Pengelolaan Hutan Mangunan (Rp)	2.260.603.000	2.411.134.750
5.	Pengelolaan Hutan Produksi Klayar Kenet	-	21.874.375
6.	Pengelolaan Hutan Produksi Ngingrong Mulo	-	21.365.750

Sumber: Tabulasi Data Statistik DLHK DIY, 2019

Berdasarkan tabel di atas, kinerja produksi kayu bulat DIY tahun 2019 menunjukkan hasil yang meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Selain dari tebangan yang direncanakan, kenaikan jumlah produksi juga berasal dari hasil penjualan barang curian yang dilelangkan serta penjualan kayu bulat yang berasal dari Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Meningkatnya permintaan pasar akan kayu bulat disokong dengan harga yang kompetitif juga turut menstimulasi peningkatan produktivitas.

Volume produksi minyak kayu putih tahun 2019 relatif menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini terjadi sebagai akibat dari penggantian *boiler* dan pemasangan *hoist crane* di Pabrik Minyak Kayu Putih Gelaran yang memakan waktu hampir 4 bulan sehingga pabrik tidak dapat beroperasi optimal pada kurun waktu tersebut. Meskipun demikian, produksi minyak kayu putih tahun 2019 sudah melampaui target yang telah ditetapkan (39.316 liter).

Hingga tahun 2018, perhitungan PDRB masih menggunakan pendekatan PDRB konvensional, khususnya untuk perhitungan nilai PDRB sub sektor kehutanan masih bertumpu pada produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini mengesankan bahwa kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB masih bersifat eksploitatif. Padahal, pengelolaan sumber daya hutan yang berprinsip pada tata kelola hutan yang lestari ternyata dapat berkontribusi secara ekonomi salah satunya melalui pemanfaatan jasa lingkungan yang sekaligus mengedepankan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya hutan yang berprinsip pada tata kelola hutan yang lestari juga memberikan potensi penyerapan karbon yang apabila dengan divalusi secara ekonomi berpotensi memberikan nilai yang tidak kalah besar. Berikut adalah perhitungan potensi perdagangan karbon berdasarkan luas kawasan hutan yang teridentifikasi di empat kabupaten di DIY.

**Tabel III.13 Potensi Penyerapan dan Perdagangan Karbon dari Kawasan Hutan Tahun 2019**

No.	Kabupaten	Luas Kawasan hutan Yang Teridentifikasi (ha)	Potensi Penyerapan Karbon (ton CO <sub>2</sub> )	Potensi Perdagangan Karbon (x Rp.1000,00)
1.	Gunungkidul	15.001,15	816.962,63	816.962.629,00
2.	Bantul	1.035,18	56.375,90	56.375.902,80
3.	Sleman	2.051,13	242.648,68	242.648.679,00
4.	Kulon Progo	1.046,49	123.799,77	123.799.767,00
	<b>Total</b>	<b>19.133,95</b>	<b>1.239.786,98</b>	<b>1.239.786.977,80</b>

Sumber: Tabulasi Data Statistik DLHK DIY, 2019

### 3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2019, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

#### 3.2.1. Sasaran 1: Tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas

1. Persentase ketercapaian pembangunan di bidang lingkungan hidup sebesar 92,29%; dengan demikian target tercapai. Persentase realisasi terhadap target sebesar 100,90 %, . Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu terdapat penurunan sebesar 100,16 %.
3. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan oleh:
  - a. Adanya publikasi, promosi dan sosialisasi yang gencar dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan;

- b. Antusiasme dan partisipasi aktif dari anggota masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri, sekolah – sekolah peserta Adiwiyata serta pihak – pihak terkait baik di tingkat DIY maupun Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Terbitnya beberapa peraturan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup khususnya di DIY, misalnya Perda DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah, Pergub DIY Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Laut, Perda DIY Nomor 5 Tahun 20017 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pergub DIY Nomor 39 Tahun 2010 Baku Mutu Emisi Gas Buang, Pergub Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca, dll.

### 3.2.2. Sasaran 2: Meningkatnya nilai produksi kehutanan

- 1. Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 1020262.4 juta rupiah; dengan demikian target tercapai. Persentase realisasi terhadap target sebesar 137,49 %. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Berhubung menggunakan angka sementara berdasar capaian kinerja tahun lalu, maka hasil tidak dapat diperbandingkan.
- 2. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 2 disebabkan oleh:
  - a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi warga masyarakat di sekitar hutan untuk turut berperan serta dalam pengamanan hutan
  - b. Meningkatnya frekuensi pendampingan dalam tata kelola hutan oleh dinas
  - c. Adanya legal standing yang kuat yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mendorong Balai KPH untuk terus eksis dalam pengelolaan hutan hingga ke tingkat tapak
  - d. Adanya kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi yang memberikan dampak positif
  - e. Kegiatan – kegiatan bertema pro lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan
  - f. Rintisan pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK, HHBK, potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit PAD

### 3.3. Realisasi Anggaran

Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	91,47%	93,41%	102,12	28.927.472.840	18.412.408.519	63,65
2	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	742.060	1.020.262,4	137,49	10.925.627.700	9.809.196.584	89,78
<b>Jumlah</b>						<b>39.853.100.540</b>	<b>28.221.605.103</b>	<b>70,81</b>
<b>Program pendukung</b>						<b>12.679.794.570</b>	<b>10.798.215.350</b>	<b>85,16</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>						<b>52.532.895.110</b>	<b>39.019.820.453</b>	<b>74,27</b>

Berdasarkan tabel III.5 di atas dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 39.853.100.540 terealisasi Rp.28.221.605.103 atau 70,81%. Sisa anggaran sebesar Rp. 13.513.074.657 atau 25,72 % antara lain bersumber dari:

- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber dan peserta
- Sisa pengadaan barang dan jasa

Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran strategis OPD tercapai 100 %, sehingga dengan demikian terdapat efisiensi belanja sebesar Rp.13.513.074.657(25,72%).

### 3.4. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus

dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY diwajibkan untuk melakukan inovasi. Komitmen inovasi tersebut tertuang dalam Surat Edaran SE Gubernur DIY No. 065/12017 Tahun 2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik yang mendorong *one agency, one innovation*. Inovasi yang diemban oleh Perangkat Daerah ditujukan juga untuk mencapai keberhasilan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

1. Menggapai Mimpi Sahabat Rimba

Inovasi yang digagas Balai KPH Yogyakarta ini adalah bukti kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan memanfaatkan kawasan hutan lindung menjadi daerah wisata alam yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan. Pada tahun 2019, inovasi ini berhasil masuk nominasi Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan kinerja*

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis capaian sasaran kinerja, diperoleh kesimpulan bahwa: Sasaran “Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas” tercapai dengan persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup sebesar 92,29%; sedangkan sasaran “Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY” juga tercapai dengan nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY sebesar 1.020.262,40 juta rupiah. Pencapaian sasaran ini akan terus ditingkatkan untuk periode tahun selanjutnya.
2. Secara garis besar, pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di tahun anggaran 2019 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam pelaksanaan program kegiatan tidak dijumpai hambatan yang berarti yang membuat kegiatan tidak terlaksana. Namun ada beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi untuk peningkatan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:
  - g. Tingginya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan
  - b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
  - c. Pengelolaan hutan belum optimal
  - d. Tingkat kemiskinan desa-desa sekitar hutan masih cukup tinggi serta belum optimalnya pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan
  - e. Belum adanya Survey Digital secara online untuk menilai Kepuasan Pengunjung di Tahura Bunder
3. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 tidak lepas dari beberapa faktor pendukung berikut, antara lain:
  - a. Adanya publikasi, promosi dan sosialisasi yang gencar dilaksanakan, misalnya melalui *talkshow* komedi di media TV lokal, iklan layanan masyarakat di surat kabar dan radio lokal, serta sosialisasi gerakan “Gemi Nastiti Ngati – Ati”. Selain pendekatan secara fisik itu seluruh karyawan

- dan karyawati juga dilibatkan untuk berkontribusi dalam penulisan berita/artikel pada website dan akun sosial media resmi dinas sebagai upaya mendekatkan diri kepada masyarakat melalui dunia maya.
- b. Antusiasme dan partisipasi aktif dari masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri, sekolah – sekolah peserta Adiwiyata serta pihak – pihak terkait baik di tingkat DIY maupun Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan
  - c. Ketersediaan SDM, sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai untuk melaksanakan program kegiatan
  - d. Faktor aturan dalam pelaksanaan pelayanan publik  
Aturan adalah perangkat penting dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi instansi. Dukungan peraturan baik pusat maupun daerah menjadi dasar sekaligus instrumen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, masing – masing bidang/balai di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menyusun SOP serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai SOP tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
4. Adapun untuk rekomendasi langkah – langkah perbaikan ke depan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menerbitkan rencana aksi tahun 2019 sebagai berikut:
- a. Pengembangan Pelayanan Pemantauan Kualitas Air dan udara (Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) untuk mengetahui unsur pencemar yang memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas air dan udara agar dapat dilakukan langkah pencegahan dan pemulihan.
  - b. Pengembangan Pelayanan pada Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Izin Lingkungan dan Pengembangan Pelayanan pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian izin usaha/kegiatan untuk mempermudah akses informasi masyarakat dan penanggungjawab usaha kegiatan dalam proses izin lingkungan dan proses pelaporan izin lingkungan.
  - c. Pengembangan Pelayanan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan (HKm, HTR) dan kerjasama.
  - d. Pengembangan Pelayanan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam melalui kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Hutan Pinus Mangunan dan lokasi replikasinya (Klayar dan Ngingrong) yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - e. Pengembangan Survey Digital untuk menilai Kepuasan Pengunjung di Tahura Bunder

# LAMPIRAN

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2017	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	85,64	88,56	91,47	94,39	97,02	100,00	100,00
2.	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	720.236	734.713	742.060	749.480	756.975	764.545	764.545

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Argulobang Nomor 19 Baciro Yogyakarta Telepon/Faksimile (0274) 588518, 512447  
Website : dishutun.jogaprov.go.id Email : dishutun@jogaprov.go.id Kode Pos 55225

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. R. SUTARTO, MP.  
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGGU BUWONO X  
Jabatan : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta,

PIHAK KEDUA  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
  
HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN DIY  
  
DLHK  
I. R. SUTARTO, MP.  
NIP. 196010011985031008



**PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY  
 Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	%	91,47	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 91,47
2.	Meningkatnya produksi kehutanan	Nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY	Juta rupiah	742.060	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 742.060

Jumlah Anggaran

Keterangan  
 Anggaran APBD : Rp.51.506.846.040,00  
 Anggaran Dekonsentrasi : Rp. 543.740.000,00  
 Anggaran DAK : Rp. 1.992.218.000,00

- 1. Program Administrasi Perkantoran : Rp. 5.300.814.120,00
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 4.111.451.500,00
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : Rp. 28.764.000,00
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan : Rp. 637.773.700,00



- 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Rp. 2.248.855.600,00
- 6. Program Pengkajian dan Pemsatan Lingkungan : Rp. 1.904.284.350,00
- 7. Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup : Rp. 2.554.440.870,00
- 8. Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi dan Konservasi Sumberdaya Alam : Rp. 14.592.323.400,00
- 9. Program Pengelolaan Persampahan Regional : Rp. 8.740.000.000,00
- 10. Program Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan : Rp. 751.573.000,00

Yogyakarta,

PIHAK KEDUA  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



*[Handwritten Signature]*

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY



DLHK  
I-R. SUTARTO, MP.  
NIP. 19501001 198503 1 008

Lampiran 4. Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**INSPEKTORAT**

Komplek Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tilogadi, Mlati, Kabupaten Sleman Kode Pos 56286 Telp. (0274) 562308 Fax (0274) 512957  
Web site: <http://inspektoral.jogjaprovgov.id> Email: [inspektoral@jogjaprovgov.id](mailto:inspektoral@jogjaprovgov.id)

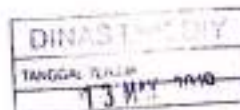
Yogyakarta, 06-05-2019

Nomor : 100/01972  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
atas Implementasi Sistem AKIP  
Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
DIY

Kepada  
Yth. Gubernur  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
di  
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, maka diindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Tugas No 177/INNSP/0018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun Anggaran 2017 untuk seluruh SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluators) Inspektoral Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
  - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
    - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub-komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;



- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
  - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
    - 1) Pemenuhan Pengukuran;
    - 2) Kualitas Pengukuran;
    - 3) Implementasi Pengukuran.
  - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
    - 1) Pemenuhan Pelaporan;
    - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
    - 3) Pemanfaatan informasi Kinerja.
  - d. Evaluasi Internal meliputi:
    - 1) Pemenuhan Evaluasi;
    - 2) Kualitas Evaluasi;
    - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
  - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
    - 1) Kinerja Yang di Laporkan (Output);
    - 2) Kinerja Yang di Laporkan (Outcome);
    - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
    - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY memperoleh nilai sebesar 78,59 kategori **BB** dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY dengan rincian sebagai berikut:
- a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,54 atau 88,45% dari bobot sebesar 30%;
  - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 20,42 atau 81,67% dari bobot sebesar 25%;
  - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,78 atau 78,54% dari bobot sebesar 15%;
  - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,25 atau 72,50% dari bobot sebesar 10%;
  - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 12,60 atau 63,02% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 yang lalu, sudah dilakukan tindak lanjut.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 seperti tersebut pada angka 4, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY beserta seluruh jajarannya agar lebih optimal dalam mencapai output dan outcome kegiatan yang di terapkan dan memperhatikan kesesuaian Renstra, Renja dan LAKIP.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Tahun 2018, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR

DESAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



YUDIS SANTOSO, S.E., M.Acs  
NIP. 19680215 199403 1 005

Tembusan :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**INSPEKTORAT**

Komplek Youth Center, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi Mlati, Kabupaten Sleman  
Telepon (0274)562089 Faksimile (0274) 512567  
Website: <http://Inspektorat.jogjaprov.go.id> Email : [inspektorat@jogjaprov.go.id](mailto:inspektorat@jogjaprov.go.id)  
Kode Pos 55286

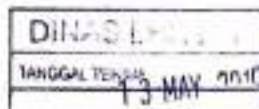
Yogyakarta, 06 - 05 - 2016

Nomor : 100/01366  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
atas Implementasi Sistem AKIP  
Badan Lingkungan Hidup DIY

Kepada  
Yth. Gubernur  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
di  
Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
  1. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
    - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;
    - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan;



2. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
  - a) Pemenuhan Pengukuran;
  - b) Kualitas Pengukuran;
  - c) Implementasi Pengukuran.
3. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
  - a) Pemenuhan Pelaporan;
  - b) Penyajian Informasi Kinerja;
  - c) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
4. Evaluasi Internal meliputi:
  - a) Pemenuhan Evaluasi;
  - b) Kualitas Evaluasi;
  - c) Pemanfaatan Evaluasi.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
  - 1) Kinerja Yang di Laporkan (Output);
  - 2) Kinerja Yang di Laporkan (Outcome);
  - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
  - 4) Kinerja dari Penilaian Stakeholder.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Lingkungan Hidup DIY memperoleh nilai sebesar 80,27% kategori A dengan interpretasi Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Badan Lingkungan Hidup DIY dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,56 atau 85,20% dari bobot sebesar 30%;
  - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 21,46 atau 85,83% dari bobot sebesar 25%;
  - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 15%;
  - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 7,08 atau 70,83% dari bobot sebesar 10%;
  - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,17 atau 70,83% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2017 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu mempertahankan atas Kinerja yang dilaporkan (Indikator Kinerja Utama) dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2018 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY beserta seluruh jajarannya agar mempertahankan atas ketercapaian kinerja Output, Outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Lingkungan Hidup DIY Tahun 2018, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR  
PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



WYOS SANTOSO, S.E., M.Acc.  
NIP. 19680215 199403 1 005

Tembusan :  
Kepala Badan Lingkungan Hidup DIY.

Lampiran 5. Tangapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKj IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Argulambang 10, Bairo, Telepon (0274) 512447, 588518  
Yogyakarta, Kode Pos 55225

Nomor	1 700/5526	Yogyakarta, 31 Desember 2019
Sifat	2 Biasa	
Lampiran	3 -	
Perihal	4 Tanggapan Atas Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP	Kepada Yth. INSPEKTUR DIV di Yogyakarta

Berhubungan surat dan Inspektur DIY perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Nomor: 700/01372 Tanggal 06 Mei 2019 dan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Badan Lingkungan Hidup DIY Nomor: 700/01368 Tanggal 06 Mei 2019 terdapat perlakuan, catatan dan rekomendasi.

Pada prinsipnya kami menerima hasil evaluasi dan perlakuan tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut atas saran/rekomendasinya, kami melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembinaan rutin pegawai yang dilakukan seminggu sekali dalam bentuk apel, pertemuan pejabat eselon II-III seminggu sekali maupun pembinaan rutin subbag/teksi yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali yang dilaporkan dalam form DIARINDU;
2. Perubahan Rencana Dinas Lingkungan Hidup DIY Tahun 2017-2022 untuk menyelaraskan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan RPJMD DIY 2017 - 2022;
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi dengan mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan serta melaksanakan evaluasi atas pencapaian output/outcome secara periodik baik mingguan, bulanan, dan triwulanan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

